

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN SISTEM BATAS MINIMAL**

**(Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec.  
Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Menenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**ATIA RAHMAN**

NPM : 1621030526

**Program Studi : Mu'amalah**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN SISTEM BATAS MINIMAL**

**(Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan. Labuhan Ratu Raya  
Kecamatan. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Menenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**ATIA RAHMAN**

**NPM : 1621030526**

**Program Studi : Muamalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M. Kom.I.**

**Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M. E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal merupakan jual beli yang dilakukan oleh seorang pedagang tekwan. Jual beli ini dilakukan dimana pedagang menetapkan batasan minimal yang harus dibeli oleh pembeli, apabila pembeli membeli dibawah batasan yang telah ditentukan maka pedagang tidak memperbolehkan dan tidak melayaninya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya? Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Jl. Untung Suropati Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang diperoleh dari penjual (pedagang tekwan) dan pembeli. Analisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian di lapangan bahwa praktik jual beli makanan dengan system batas minimal ialah jual beli yang diberikan batas minimal harga paling rendah terhadap pembelian suatu barang atau makanan yang dapat diperjualbelikan. Dimana, pembeli dapat membeli suatu makanan atau barang dengan harga yang paling rendah, dan harga tinggi. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Batas Minimal, dilihat dari Sighat dalam jual beli sudah sesuai dalam akadnya Rukun jual beli sudah sesuai dengan ketentuan syara' terdiri dari penjual dan pembeli, serta adanya objek yang jelas dengan akad telah disepakati antara penjual dan pembeli. Namun, dilihat dari syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan syara' karena terdapat adanya perbuatan yang dilarang, yakni adanya pembatasan hak yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Sebab dalam jual beli tidak boleh dibatasi dalam hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATIA RAHMAN

NPM : 1621030526

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan. Labuhan Ratu Raya Kecamatan. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung)”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2020  
Penulis,

**ATIA RAHMAN**  
Npm. 1621030526



## PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan  
secukupnya maka, skripsi saudara :

Nama : Atia Rahman

NPM : 1621030526

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM BATAS  
MINIMAL (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di  
Kelurahan. Labuhan Ratu Raya Kecamatan. Labuhan  
Ratu Kota. Bandar Lampung)**

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M. Kom.I

Gatot Bintoro Putro Aji, M. E.Sy.

NIP. 196808271994031004

NIP. 198311232019031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM BATAS MINIMAL (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung)** Disusun Oleh : **Atia Rahman, NPM: 1621030526,** Jurusan: Muamalah. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2020.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua**

: **Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris**

: **Muslim, S.H.I., M.H.I**

**Penguji I**

: **Dr. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Penguji II**

: **Drs. H. Zikri, M. Kom.I**

**Penguji III**

: **Gatot Bintoro Putro Aji, M. E.Sy.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP.196210221993031002



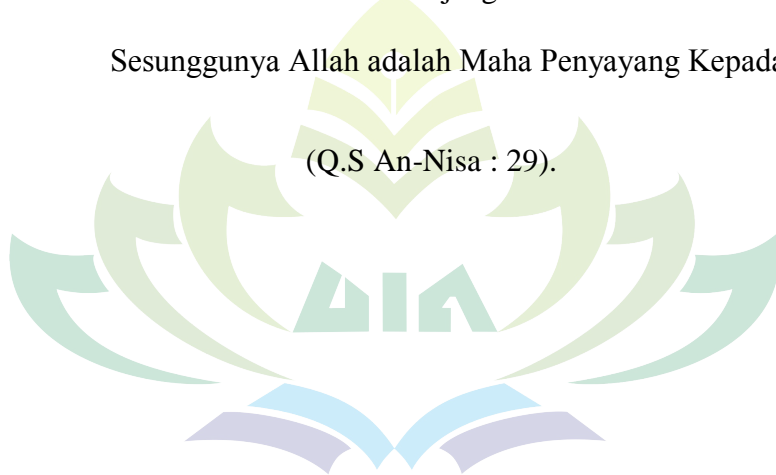
## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S An-Nisa : 29).



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kebahagiaan dan kebanggaan, dengan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini kupersembahkan untuk kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Abdurrahman) dan ibundaku (Asnawati) yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat penuh cinta dan kasih sayang, serta tak pernah lelah untuk selalu mendo'akanku dan bekerja keras demi keberhasilan anak-anaknya;
2. Kakak dan adik-adikku tersayang Atika Rahman, Aldi Rahman, dan Aldafit Rahman, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik;
3. Para Sahabat-sahabatku Outno Ceangry (Anggraini, Fraya, Indah, Karina, dan Livia), Ratu Drama (Dina, Ipi, Epi, Lita, dan Tutun), Filya Zamasi, Siska Amelia, Ayu Septiana, Dewi Masdaleny, Tria Mei Diani, dan Elvia Suci Meilantika yang telah menemani dan memberikan dukungan baik di dalam maupun di luar kampus serta seluruh teman-teman seperjuanganku Kelas Muamalah J yang telah mengisi hari-hariku di kampus;
4. Bagaskara Probo Anggara yang telah menemani dan memberikan dukungan kepadaku dalam pembuatan skripsi ini;



5. Yang ku banggakan Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Januari 1998. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Abdurrahman dan Ny. Asnawati orang tua yang sangat luar biasa dan sangat berarti bagi penulis. Penulis memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Atika Rahman dan dua orang adik laki-laki yaitu Aldi Rahman dan Aldafit Rahman yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Pendidikan penulis dimulai dari SDN 2 Kampung Baru dan selesai pada tahun 2010, SMP 8 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, SMAS Yadika Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester I TA. 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi pada Penjual Bakso Malang Kelurahan. Labuhan Ratu Raya Kecamatan. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarganya, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta;
2. Dr. H. Khairuddin, M. H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta segenap jajarannya;
3. Khairuddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Juhrotul Khulwah,

M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

4. Drs. H. Zikri, M. Kom.I., sebagai Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai dan Gatot Bintoro Putro Aji, M. E.Sy., sekaligus Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Instusi yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
7. Pedagang Tekwan yaitu Bapak Rimin dan pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk diwawancara;
8. Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, membantu, dan menemani dalam keadaan apapun.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Juli 2020

Penulis,

**Atia Rahman**  
**NPM. 1621030526**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikasi Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori .....	15
1. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	15
a. Pengertian Jual Beli.....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24

d. Macam-macam Jual Beli.....	29
e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	32
2. Akad .....	33
a. Pengertian Akad .....	33
b. Rukun dan Syarat Akad .....	34
c. Sah dan Batalnya Akad .....	41
3. Transaksi Yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Hukum Islam ..	45
a. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam.....	45
b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Islam .....	48
4. Pandangan Islam tentang Penetapan Harga .....	57
5. Jual Beli Merupakan Lingkup Muamalah.....	62
B. Tinjauan Pustaka .....	63
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Labuhan Ratu Raya .....	66
1. Sejarah Singkat Kelurahan Labuhan Ratu Raya.....	66
2. Letak Administratif dan Letak Geografis Kelurahan Labuhan Ratu Raya.....	70
3. Visi dan Misi Kelurahan Labuhan Ratu Raya.....	70
4. Struktur dan Daftar Pamong Kelurahan Labuhan Ratu Raya .....	71
5. Keadaan Sosial di Kelurahan Labuhan Ratu Raya.....	73
B. Deskripsi Data Penelitian .....	79
1. Profil Tentang Penjual Bakso Malang .....	79
2. Sejarah Berdirinya Bakso Malang .....	81
3. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Bakso Malang.....	83
4. Pihak-pihak yang Terkait dalam Jual Beli Bakso Malang .....	84
5. Pendapat tentang Pelaksanaan Jual Beli Bakso Malang .....	84
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>92</b>
A. Bagaimana Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal di Labuhan Ratu .....	92



B. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi .....	100
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Daftar Pamong Lingkungan I.....	72
2. Daftar Pamong Lingkungan II .....	72
3. Jumlah Keseluruhan Penduduk.....	73
4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	74
5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	75
6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan dan Jenis Kelamin .....	75



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami proposal ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung)”** Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Raminto dan Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 2.

<sup>2</sup>Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.



Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan.<sup>3</sup>

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>4</sup>

Makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh.<sup>5</sup>

Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.<sup>6</sup>

Batas minimal adalah suatu pembelian yang ditetapkan oleh penjual sehingga mencapai suatu nilai tertentu.

Berdasarkan beberapa penegasan arti diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung) adalah penelitian tentang pembelian tekwan yang sudah ditentukan batas

---

<sup>3</sup>Zain, “Pengertian Praktik” (on-line), tersedia di: <https://penngertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html> (27 September 2019).

<sup>4</sup>Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013), h. 26.

<sup>5</sup>Toni Saputra, “Arti Kata Makanan” (on-line), tersedia di: <https://jagoankata.com/arti-kata/makanan.html>. (27 September 2019).

<sup>6</sup>Anwarsyar, “Pengertian Makanan” (on-line), tersedia di: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>. (27 september 2019).

minimal nya oleh pedagang sehingga pembeli tidak boleh membeli dibawah batas minimal tersebut.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

Objek penelitian ini adalah tentang praktik jual beli dengan sistem batas minimal, yang mana penjual tidak memperbolehkan membeli dibawah batasan yang sudah ditentukan. Tekwan dijual dengan harga Rp. 1000,- per satuannya, namun batasan yang harus dibeli ialah Rp. 5000,- apabila ingin membeli dibawah batasan yang telah ditentukan, maka penjual tidak memperbolehkan dan tidak melayaninya. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisa dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subyektif**

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis . Disamping itu, judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan hukum islam, yang diperkuat referensi, surat kabar, maupun media elektronik lainnya.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat.<sup>7</sup>

Salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia yaitu Makanan yang merupakan kebutuhan primer. Setiap orang pasti membutuhkan makanan karena makanan berfungsi untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh dan juga dengan makanan kecukupan energi kita terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan ini manusia cenderung akan melakukan transaksi muamalah. Aspek yang terpenting dalam muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara'. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11-12.

<sup>8</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekan baru: Suska Press, 2008), h. 45.

Kebolehan ini di dasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa : 29).<sup>9</sup>

Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat sah yang sudah ditentukan. Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang di lakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya praktik jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada pihak pihak yang dirugikan. Namun dilihat dari kasus diatas, praktik jual beli tersebut adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh penjual karena telah menetapkan batasan minimal yang harus dibeli. Maka dalam hal ini, praktik jual beli tersebut dapat mengakibatkan pembeli merasa dirugikan, karena harus membeli diatas harga yang sudah ditentukan oleh penjual yang pada akhirnya menimbulkan ketidakridhoan dari salah satu pihak.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung : PT Alma'rif), h. 83.



Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal sebagaimana yang dilakukan oleh penjual tekwan di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal (Studi Kasus Pada Penjual Bakso Malang di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung”.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli makanan dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik jual beli dengan sistem batas minimal di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal dalam akad jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah, serta pihak pihak lain di Indonesia mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Batas Minimal. Dan hasil penelitian ini

dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan prosedur penelitian

Berdasarkan kajian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada.<sup>10</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan nya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif

---

<sup>10</sup>Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum" (on-line), tersedia di: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> (10 Oktober 2019).

yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.<sup>11</sup> Dalam hal ini berkaitan dengan Praktik jual beli Makanan dengan sistem batas minimal.

## 2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menguraikan suatu makna, menguji suatu proses sehingga akan diperoleh pengertian dan pemahaman yang luas serta spesifik mengenai suatu situasi yang sedang terjadi.

## 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian :

### a. Populasi dan Sampel

#### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud dengan populasi di penelitian ini adalah orang yang ikut berpartisipasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual berjumlah 1 orang dan pembeli berjumlah 20 orang.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 18.

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 80.



Hitungan rata-rata pendapatan perminggu, jadi 20 orang x 7 hari = 140 orang yang mayoritas masuk kedalam kriteria anak sekolah (pelajar).

## 2) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang mewakili karakter populasi tersebut sehingga dapat menunjang penelitian.<sup>13</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang lebih dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi  $140 \times 10\% = 14$ . Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 orang penjual, dan 13 orang pembeli.

### b. *Setting* (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti ialah tempat penjual tekwan yang beralamat di Jl. Untung Suropati Kec. Labuhan Ratu Raya Kel. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.

## 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Primer dan data Sekunder.

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 188.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.<sup>15</sup>

5. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari tinjauan hukum islam dan hukum positif. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

b. Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer.

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 57.

<sup>15</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h. 64.

penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana di bawah ini:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin di dapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.<sup>16</sup>

Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli bakso malang di Kel.Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>17</sup>

### 6. Prosedur Analisis Data

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 96.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 206.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>18</sup>

Metode berfikir yang di gunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga diperoleh jawaban permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.

#### 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengolahan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan atau rumus–rumus tertentu.

##### a. *Editing*

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Lexy J Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskardaya, 2000), h. 49.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 153.



b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>21</sup>

c. *Analizing*

Metode Analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode Analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari bersifat umum ke khusus. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.<sup>22</sup>

*Analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar dan semu, kemudian diteliti lebih lanjut yang akan lebih jelas data yang diperoleh dan hasilnya akan relevan, pada teknik ini peneliti akan menganalisa proses praktik jual beli dengan sistem batas minimal pada Penjual Bakso Malang di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota. Bandar Lampung.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 154.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 1998), h. 300.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Kata “jual” berarti merujuk pada “penjual” dan “beli” berarti merujuk pada “pembeli”.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya: Jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syia'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.<sup>2</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S Fathir: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “mereka mengharapkan *ijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015),

Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi, yaitu:

- a) Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>4</sup>
- b) Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>5</sup>
- c) Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.<sup>6</sup>

Jual beli menurut istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.<sup>7</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut beberapa ulama:

1. Menurut ulama *Hanafiyah*

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

<sup>5</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 390.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 119-120.

<sup>7</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 113.

Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui *ijab* dan *qabul*. Dimana *ijab* berarti ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* berarti pernyataan menjual dari penjual). Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual belikan itu bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.

## 2. Ulama *Hanabilah*

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan”.<sup>9</sup>

Dalam pengertian ini, menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

## 3. Ulama *Malikiyah*

Ada dua pengertian, yaitu:

### a. Pengertian dalam arti umum

“Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati ma'ani al-fadz al-Manhaj*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 320.

<sup>10</sup>Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 204



Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang di tukarkan yaitu *dzat* (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

b. Pengertian dalam arti khusus

“jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang”.<sup>11</sup>

Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui lebih dahulu.

4. Ulama *Syafi'iyah*

Jual beli pada prinsip nya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 372.

<sup>12</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm*, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

5. Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab Al-Majmu, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.<sup>13</sup>

6. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang diperbolehkan.<sup>14</sup>

7. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni<sup>15</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

8. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar-menukar benda atau barang

<sup>13</sup>Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 149

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid XII* (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 45.

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

<sup>16</sup>Shobirin, “*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Jual Beli dalam Pandangan Islam Bisnis*”. Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 241.

yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam<sup>17</sup>:

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengatur nya dalam Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 193.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 76

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya : Dan Allah membuat perumpamaan dengan dua orang laki-laki, salah satunya adalah seorang bisu, yang tidak mampu berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?.<sup>20</sup>

Terdapat juga dalam Q.S Al-Baqarah : 282

....وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ....

Artinya: “....Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....”<sup>21</sup>

Serta Allah juga menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ....

<sup>19</sup>The Noble Qur'an, "An-Nisa'-29 Surat Wanita Ayat-29" (on-line), tersedia di: <https://id.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/29> (12 November 2019).

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h.651.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 71

Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>22</sup>

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>23</sup>

## 2) Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun hadits yang menerangkan tentang jual beli menurut riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>24</sup>

Artinya: Dari Rifa’ah ibn Rafi RA “Nabi SAW. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi).

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.70

<sup>23</sup>Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013), h. 173-174.

<sup>24</sup>Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h.271

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>25</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>26</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu sah dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخارى)<sup>27</sup>

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah* (jual beli buah yang masih diatas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli *raba* (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*”. (HR. Bukhari)

### 3) Dalil Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

<sup>25</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>26</sup>Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al—Kiram Syah Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar Al- Da’i), h. 645.

<sup>27</sup>Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h.299.



Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>28</sup> Dengan disyari'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

#### 4) Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.<sup>29</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama teradi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "*Jual Beli dan Syarat-syaratnya*" (on-line), tersedia di: <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html> (13 November 2019).

- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)<sup>30</sup>

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan *qabul* dilakukan. Sebab ijab *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab *qabul* dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan *qabul*.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan *qabul*.

Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>31</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Majah).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.76.

<sup>31</sup>Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h.301.

jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.<sup>32</sup>

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadi nya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shigat, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

<sup>33</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 81-83

a. Syarat Aqid

1) Dewasa atau sadar

*Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

3) Islam

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Shigat*

1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu.”

3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukan batal.

- 7) Ijab *qabul* tidak terpisah

Antara ijab dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak.

- 8) Antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan persyaratan lain

- 9) Tidak berubah *lafazh*

- 10) Bersesuaian antara ijab dan *qabul* secara sempurna

- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud alaih* (barang)<sup>34</sup>

- 1) Suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat misalkan kotoran hewan untuk pupuk tanaman.
- 2) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- 3) Tidak boleh dibatasi, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.<sup>35</sup>
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Barang milik sendiri atau menjadi wakil oranglain
- 6) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

**d. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

---

<sup>34</sup>Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 252.



- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>36</sup>

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.<sup>37</sup>

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat<sup>38</sup> yaitu:

- 1) Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.

<sup>36</sup>Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 179-180.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-77.

<sup>38</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 102.

- 2) Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- 1) Jual beli Sah (*halal*), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- 2) Jual beli Batal (*haram*), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- 3) Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam<sup>39</sup> yaitu:

---

<sup>39</sup> Artikelsiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli" (on-line), tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html> (22 November 2019 ).

- 1) Jual beli Salam (*Bai' as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- 2) Jual beli Istisna' (*Bai' al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

**e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli<sup>40</sup> antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>40</sup>A. Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 133.

## 2. Akad

### a. Pengertian Akad

Menurut segi etimologi (bahasa), akad berarti :

أَلَّا رُبُّ بَطْنٍ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ أ

وَمِنْ جَانِبَيْنِ<sup>41</sup>

Artinya : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Bisa juga berarti العقدة (sambungan), العهد dan (janji).

Menurut terminologi (istilah) ulama fiqih, akad dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

#### 1) Secara Umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Yaitu: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf*, *talak*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukkannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

#### 2) Secara khusus

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, akad berarti *ijab* dan *qabul*. Dimana *ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.<sup>42</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Akad**

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

##### **1) *Aqid* (orang yang berakad)**

Rukun pertama dalam akad adalah orang yang berakad, atau sebagai subjek hukum. subjek hukum disini ialah manusia dan badan hukum. Dalam *fiqh*, subjek akad perorangan tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad.

Berkaitan dengan kecakapan orang melakukan akad ini, para *fuqaha* membahasnya ada tiga hal pokok yaitu *Ahliyah* (kecakapan hukum), yaitu kepantasan seseorang untuk berhubungan dengan akad. *Al-wilayah* (hak atau kewenangan), yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu.

---

<sup>42</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 43-45.

*Iradh* yakni adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.<sup>43</sup>

2) *Ma'qud 'alaih* (benda-benda atau objek yang diakadkan)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus adanya *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut.<sup>44</sup> Objek akad hanya benda-benda yang halal dan bersih dari najis dan maksiat. Syarat objek ialah:

a) Telah ada pada waktu diakadkan

Objek akad harus ada wujud nya ketika diadakannya akad. Barang yang belum berwujud atau tidak ada wujudnya tidak bisa dijadikan objek akad. Namun para fuqaha memberikan pengecualian, yaitu seperti pada akad *salam* (pesanan), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), dimana objeknya cukup diperkirakan berwujud dimasa yang akan datang. Pengecualian tersebut didasarkan prinsip *istihsan* untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan manusia dan tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 55-56.

<sup>44</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 249.

<sup>45</sup>Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 35-36.



b) Dibenarkan oleh *syara'*

Benda-benda yang dijadikan objek harus bermanfaat bagi manusia. Jika objeknya bertentangan dengan syariah maka batal akadnya.<sup>46</sup>

c) Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak

Objeknya harus dapat diketahui dan ditentukan para pihak yang berakad. Ketidak jelasan objek akan menimbulkan sengketa.

d) Dapat diserahkan

Objek harus dapat diserahkan, baik pada waktu akad maupun belakangan sesuai kesepakatan, namun objek harus benar-benar ada secara sempurna atau tewujud.<sup>47</sup>

e) Milik sendiri, tidak sah menjual barang oranglain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

3) *Maudhu' al 'aqad* (tujuan atau maksud pokok akad)<sup>48</sup>

Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan harus dibenarkan oleh *syara'*.

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 37.

<sup>48</sup>Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah* (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 132.

- 4) *Shigat al 'aqad* (ijab dan qabul atau ucapan dari kedua belah pihak yang berakad)

Shigat akad merupakan cara bagaimana pernyataan pengikat diri itu dilakukan. Shigat merupakan rukun akad yang paling penting. Shigat diwujudkan dengan ijab dan qabul. Dimana ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua untuk menerimanya.

a) Metode (*uslub*) Shigat ijab dan qabul

*Uslub* shigat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu:<sup>49</sup>

- (1) Akad dengan *Lafadz* (ucapan), yaitu para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan yang jelas dan menunjukkan keridhoannya.
- (2) Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan oleh kedua pihak dengan perbuatan yang saling meridhoi. Misalnya, penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.
- (3) Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan karena para pihak tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan perikatan.

---

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 46.

- (4) Akad dengan isyarat, akad tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal. Orang cacat pun bisa melakukan perikatan, apabila ia tuna wicara maka dimungkinkan dengan bahasa isyarat.

b) Syarat-syarat ijab dan *qabul*<sup>50</sup>

- (1) Ijab dan *qabul* harus jelas dan bisa dipahami. Yakni, sighat harus meunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku untuk bertransaksi.
- (2) Ada kesesuaian antara ijab dan *qabul*. Yakni, ijab dan *qabul* harus bersesuaian dimana suatu pihak melakukan ijab atas objek akad tertentu maka *qabul* juga harus melakukan objek *qabul* tertentu.
- (3) Ijab dan *qabul* harus dilakukan berturut-turut. Yakni, ijab dan *qabul* harus dilakukan satu waktu dan salah satu pihak melakukan sesuatu yang menunjukkan keridak setujuannya terhadap isi ijab.

c) Pembatalan ijab<sup>51</sup>

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- (1) Pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum *qabul*.
- (2) Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- (3) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad terpisah.

<sup>50</sup>Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 28-30.

<sup>51</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 53.

- (4) Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila, dan lain-lainnya sebelum adanya qabul.
- (5) Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.

Berdasarkan rukun-rukun akad yang telah dibahas diatas, akad juga memiliki beberapa syarat akad, diantaranya:

#### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Umum, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada bagian sebagian akad, tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### 2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad ialah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi rusak. Ada kekhususan syarat sah pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan

waktu, perkiraan, unsur kemudharatan, serta syarat-syarat jual beli rusak (fasid).

### 3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaannya, akad ada dua syarat. Yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Dan kekuasaan ialah kemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara asli maupun penggantian (menjadi wakil oranglain).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus benar-benar milik orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung pada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan oranglain.

### 4) Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Diantara syarat *luzum* dalam jual beli ialah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain. Jika terjadi *luzum* maka akad batal atau dikembalikan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 64-66.

### c. Sah dan Batalnya Akad

#### 1) Sah nya Akad

Akad akan menjadi sah jika rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dipenuhi dan akan menjadi tidak sah apabila rukun-rukun serta syarat-syarat akad tersebut tidak terpenuhi.

Akad sah dibagi menjadi tiga, yaitu:

##### a) Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad. Akad *mauquf* hanya mempunyai akibat hukum apabila mendapat izin secara sah dari orang yang mempunyai kekuasaan akad.

Sebab-sebab akad *mauquf* ada dua, yakni:

- (1) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan dengan kata lain kekurangan kecapan. Orang-orang tersebut ialah: Remaja yang *mumayyiz*, orang yang sakit ingatan tetapi tidak mencapai gila, orang yang pandai memboroskan harta, orang yang mempunyai cacat kehendak karena paksaan.
- (2) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek tersebut. Yang meliputi: akad *fudhuli* tanpa kewenangan, akad orang sakit mati yang membuat



wasiat lebih dari sepertiga hartanya, akad orang dibawah pengampuan, akad penggadai yang menjual barang yang sedang digadaikan, dan akad penjualan oleh pemilik terhadap benda miliknya yang sedang disewakan.

Hukum akad *mauquf* adalah sah, hanya saja akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk memberikan membenaran atau pembatalan tersebut.

b) Akad *Nafiz Lazim*

Akad *Nafiz Lazim* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya yang tidak dapat difasakh oleh masing-masing pihak tanpa izin pihak lain.

c) Akad *Nafiz Gair Lazim*

Akad *Nafiz Gair Lazim* adalah akad *nafiz* yang mungkin di *fasakh* (dibatalkan) oleh masing-masing pihak, atau hanya salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Hukum akad ini adalah sah, akan tetapi terdapat beberapa macam akad yang karena sifat aslinya terbuka untuk difasakh secara sepihak. Seperti akad pemberian kuasa, hibah, penitipan, pinjam pakai, gadai, penanggungan, dan akad yang salah satu pihak mempunyai hak *khiyar*.

## 2) Batalnya akad

Akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak menerima hukum akad hingga pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Akad batal bila rukun-rukun akad tidak terpenuhi baik satu rukun atau lebih atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek dalam jual beli tidak jelas.<sup>53</sup>

yang tergolong dalam batalnya akad, ada dua yaitu:

### a) Akad *Batil*

Menurut ulama Hanafi definisikan akad *batil* secara singkat sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokok dan sifatnya. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.<sup>54</sup>

Hukum dari akad *batil* ini ada 5 ciri-cirinya:<sup>55</sup>

- (1) Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

---

<sup>53</sup>Andreawan. "Sah dan Batalnya Akad" (on-line), tersedia di : <https://text-id.123dok.com/document/eqogv80z1-sah-dan-batalnya-akad.html> (23 November 2019) .

<sup>54</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 245.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 246.

- (2) Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad ini wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *batil* ini.
- (3) Akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin.
- (4) Tidak perlu dilakukan pembatalan karena akad ini sejak semula merupakan akad yang batal dan tidak pernah ada.
- (5) Ketentuan waktu tidak berlaku pada kebatalan.

b) Akad *fasid*

Akad *fasid* merupakan akad dimana rukun sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak. Maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi menjadi *fasid*. Menurut ahli hukum Hanafi, akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah dalam sifatnya.

Adapun akad *fasid* menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa suatu akad dikatakan *fasid* apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.<sup>56</sup>

Hukum akad *fasid* menurut jumhur ulama, akad *fasid* maupun akad *batil* sama-sama merupakan akad yang tidak ada

---

<sup>56</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 115.

wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>57</sup>

### 3. Transaksi yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Hukum Islam

Transaksi jual beli sendiri ada yang diperbolehkan maupun dilarang dalam hukum Islam. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut:

#### a. Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu:

##### 1) *Bai' al-Mutlaqah*

Yaitu menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau uang. Jenis jual beli ini termasuk salah satu jenis jual beli yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Contoh jual beli adalah membeli pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan.

##### 2) *Bai' al-Muqayadhah*

Yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang di sebut juga *barter*. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu saja, namun pada zaman sekarang ini masih menjadi salah satu pilihan masyarakat. Contoh jual beli adalah menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, serta binatang ternak dengan barang tertentu lainnya.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 249.

### 3) *Bai' al-Murabahah*

Yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya. Namun seorang penjual barang harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Serta dalam menentukan keuntungan, penjual harus memiliki pertimbangan antara aspek komersial dan sosial untuk saling menolong. Contoh jual beli adalah menjual harga aslinya Rp. 40.000,- menjadi Rp. 45.000,- sehingga penjual mendapat keuntungan sebesar Rp. 5000,-.

### 4) *Bai' al-Wadhiah*

Yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokok. Contoh jual beli adalah seorang penjual handphone (HP) yang baru dibelinya dengan harga Rp. 500.000,- namun karena adanya kebutuhan tertentu, maka ia menjual kembali dengan harga Rp. 450.000,-. Praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama hal dibangun atas prinsip saling rela tanpa adanya keterpaksaan.

### 5) *Bai' al-Inah*

Yaitu jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli dimana seseorang menjual barangnya dengan harga tangguh lebih tinggi, dan menjual dengan harga lebih murah jika secara tunai. Contoh dalam praktik sehari-hari yaitu seorang penjual

dimana ia mengkreditkan barangnya kepada seorang pembeli namun apabila pembeli belum mampu membayar, maka tidak boleh mengambil kembali barang yang telah dijual tersebut.

6) *Bai' al-Istishna*

Yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan (pembuatan) barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan. Contoh seperti pemesanan pembuatan kursi, lemari, pakaian pada penjahit, dan yang lainnya.

7) *Bai' al-Sharf*

Yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya. Menurut ulama Fikih, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>58</sup>

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi
- c) Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang yang sama, maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d) Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

8) *Bai' al-Salam* (pesanan)

---

<sup>58</sup>Tuntunan Islam. "Jual Beli Diperbolehkan" (on-line), tersedia di : <http://tuntunanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> (23 November 2019).

Yaitu jual beli barang melalui pesanan. Yakni jual beli dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>59</sup> Jual beli ini seperti jual beli istishna namun, jual beli salam ini barangnya sudah ada. Tidak seperti jual beli istishna.

9) *Bai' at-Tauliyah*

Yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, atau menjual dengan harga aslinya.<sup>60</sup> Contohnya seperti seseorang membeli barang dengan harga Rp 150.000,- kemudian ia jual kembali dengan harga yang sama.

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah *bai' al-Murabahah*, *bai' al-Salam* dan *bai' al-Istishna*.<sup>61</sup>

**b. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan dalam Hukum Islam**

Risalah tentang jual beli yang dilarang dalam Islam ini kami adaptasi dari kitab *Fiqh Wa Fatawa Al Buyu'*, hlm. 125 s/d 137, karya Syaikh Shalih Al Fauzan bin Fauzan.

Awalnya merupakan ceramah beliau di Masjid Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz Alu Su'ud, Riyadh, bulan Jumadil Ula 1411 H. Kami angkat ke hadapan pembaca, supaya kaum muslimin mengerti dan kemudian menjauhi perniagaan yang terlarang. Sehingga dalam

<sup>59</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 101.

<sup>60</sup>*Ibid.*,

<sup>61</sup>Amwaluna, "Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah". Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), h.



melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan *syari'at*, hendaklah menjauhi muamalah dan usaha-usaha yang buruk yang diharamkan. Rasulullah melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan *mudharat* (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang. Jika akad jual beli menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau *masbuq*. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang.

Perhatikanlah firman Allah *Azza wa Jalla* “maka mereka itulah orang-orang yang rugi”. Allah menyatakan mereka mengalami kerugian, meskipun mereka kaya, berhasil mengumpulkan banyak harta dan memiliki banyak anak. Sesungguhnya harta dan anak-anak mereka tidak akan bisa menggantikan dzikir yang terlewatkan.<sup>62</sup>

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Melaksanakan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya.

Inilah perniagaan yang menguntungkan, jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas

---

<sup>62</sup>Syaikh Shalih Al Fauzan, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam”, (on-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (20 Februari 2020)

kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Thaha: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

وَالْعِقَابَةُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang merugi. Seandainya seseorang melakukan ibadah, shalat, dzikir dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, niscaya Allah membukakan pintu rezeki baginya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.”<sup>63</sup>

Shalat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang mencari rezeki, ternyata sebaliknya, bisa membuka pintu rezeki, kemudahan dan barakah. Jika engkau berdzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki buatmu, dan Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang *syar’i*, ini berarti penjual telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya..., h. 352

Jual beli yang dilarang ialah, menjual berbagai macam alat musik. Seperti seruling, kecapi, perangkat-perangkat musik dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk perbuatan sia-sia. Meskipun alat-alat itu diberi istilah lain, seperti alat-alat kesenian. Maka haram bagi kaum muslim untuk menjual semua alat dan perangkat-perangkat itu. Seharusnya alat-alat tersebut dimusnahkan dari negeri kaum muslimin agar tidak tersisa.<sup>64</sup>

Jual beli yang dilarang ialah, menjual gambar. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang berjualan *ashnam*, maksudnya ialah gambar. Pada dasarnya *ashnam* itu adalah gambar patung, baik patung khayalan, burung, binatang ternak atau manusia. Termasuk jual beli yang dilarang ialah, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya *haram* dan *bathil*. Jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki misalnya seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada penjual. Kemudian antara penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Penjual tadi

---

<sup>64</sup>Syaikh Shalih Al Fauzan, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam”, (on-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (20 Februari 2020).

kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar di belakang.

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*).<sup>65</sup> Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, serta mampu dalam bertindak secara bebas dan baik. Mereka tidak dipandang sah melakukan jual beli apabila:

- a) Jual beli orang gila, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu juga orang yang mabuk, sakalor, dan yang lainnya.
- b) Jual beli anak kecil, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini tidak sah karena tidak ada ahliah. Jual beli yang dilakukan oleh

---

<sup>65</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Enslikopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34.

anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.<sup>66</sup>

- c) Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- d) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.
- e) Jual beli *fudhul*, merupakan jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.
- f) Jual beli orang yang terhalang, maksud nya jual beli orang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
- g) Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang bahaya. Yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

## 2) Terlarang Sebab *Shigat*

Ulama telah sepakat atas sah nya jual beli didasarkan pada keridhaan dianatara pihak yang melakukan akad. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, seperti:

- a) Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai ijab dan *qabul*.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari pihak pertama kepada

---

<sup>66</sup>Rachmay Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 93.

pihak kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.<sup>67</sup>

- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah.
  - d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
  - e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
  - f) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
- 3) Terlarang *Sebab Ma'qud alaih* (Barangnya)
- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
  - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di kolam.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*,

- c) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidak jelasan. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>68</sup>
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, menurut ulama jual beli barang yang najis itu seperti khamar. Barang yang terkena najis seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- e) Jual beli air, ulama Zhahiriyyah melarang secara mutlak jual beli air ini.
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), menurut ulama Hanafiyah adalah fasid. Sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan antara manusianya.
- g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat.
- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang.

---

<sup>68</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". Jurnal al-adalah, Vol. 12 No. 3 (Juni 2015), h. 656.



Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak, dan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum ada buahnya, diseepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang akadnya *fasid* menurut jumhur ulama.

4) Terlarang Sebab Syara'

- a) Jual beli riba, menurut ulama Hanafiyah hanya riba *naslah* dan riba *fadhl* hukumnya *fasid*. Tetapi menurut jumhur ulama hukumnya batal.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut jumhur hukumnya batal sebab ada nash yang melarang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, dan patung.
- c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
- d) Jual beli waktu azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, seseorang telah sepakat akan membeli namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain untuk membeli barang yang sama dan menyuruh membatalkan pembeli yang pertama sebab ia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- h) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah sah jika syaratnya baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah jika bermanfaat, ulama Syafi'iyah boleh jika syarat maslahat bagi satu pihak yang melangsungkan akad, dan tidak boleh menurut ulama Hanabilah jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>69</sup>

#### 4. Pandangan Islam tentang Penetapan Harga

Harga merupakan imbalan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual untuk memperoleh barang yang dijual atau wujud nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga merupakan nilai yang diberikan dari apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat dari apa yang diperjual belikan. Semakin tinggi manfaat yang dapat dihasilkan dan dirasakan seseorang dari barang atau jasa, maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.<sup>70</sup>

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menjadi pengawas pasar (Muhtasib). Dimana pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak

<sup>69</sup>Abdullah, *Ensiklopedi*, h. 68.

<sup>70</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 154.

untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, dimana pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Dibuktikan dengan adanya suatu hadist yang diriwayatkan oleh enam imam hadist (kecuali Imam Nasa'i) yang berbunyi: "Manusia berkata saat itu, Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami". Rasulullah bersabda yang artinya: "sesungguhnya Allah adalah penentu harga, adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang diantara kalian tidak menuntuku karena kedzaliman dalam hal darah dan harta".

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kedzaliman, sedangkan dzalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan mendzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan mendzalimi penjual.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Seandainya, Rasulullah saat itu langsung

menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penetapan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>71</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>72</sup>

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Ada dua terma yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan

---

<sup>71</sup>Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), h. 201-204.

<sup>72</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 169-170.

harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-Adl*).<sup>73</sup>

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidak adilan yang mendzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentang dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi dipasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Prinsip *ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli.
- b) Prinsip persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihthikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c) Prinsip kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak angung

---

<sup>73</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, (Rajawali Press, 2014), h. 233.

<sup>74</sup>Abdul aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 268.

kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan secara luas.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam bermu'amalah.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diindikasikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu.<sup>75</sup>

Islam telah memberikan batasan-batasan supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun penjual terutama dalam pemberian harga, karena pada prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dalam penentuan harga.

Secara umum, harga yang adil dapat disimpulkan bahwa harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual

---

<sup>75</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, h. 90.

memperoleh keuntungan yang semesetinya dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang diberikannya.

## 5. Jual Beli Merupakan Lingkup Muamalah

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah. Adapun pengembangan dalam muamalah yang dibenarkan yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sekalipun tidak sengaja, maka akan diminta pertanggung jawaban.

Prinsip-prinsip utama dalam muamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29.

Dalam fiqih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu pada asalnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan pada *keharamannya*.

Kaidah ini disampaikan oleh Imam *Syafi'i*, *Maliki*, dan Imam Ahmad.

- a. Muamalah objek dan proses nya harus *syar'i*.
- b. Muamalah mesti dilakukan atas dasar suka sama suka.
- c. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan *mashlahat* dan menolak *mudharat* bagi umat manusia.
- d. Muamalah terhindar dari *kedzaliman*, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara*.



Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (akad), dan prinsip diantaranya:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar syara.
- b. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syara.
- c. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Syara (hukum) mewajibkan atas semua perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Batas Minimal”.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Durrotul Isnaeni Haqi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran”. Fakultas

Syari'ah, IAIN PURWOKERTO. 2017. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dilakukan secara langsung dan lisan serta pembayaran dilakukan secara tunai. Praktik jual beli tanpa nomor pendaftaran diperbolehkan dalam hukum Islam jika sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dan juga terdapat adanya *khiyar 'aib* terhadap barang yang cacat atau basi. Namun menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan tidak diperbolehkan karena melanggar aturan pemerintah, dan peraturan pemerintah tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil *masalah mursalah*, yang berguna untuk melindungi pembelian demi kemaslahatan masyarakat.<sup>76</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziatul Jamilah yang berjudul “Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah”. Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung. 2017. Hasil yang didapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syari'ah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad jual beli biasanya disertakan yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Dan pada

---

<sup>76</sup>Durrotul Isnaeni Haqi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017).

pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar hukum syar'i.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup>Fauziatul Jamilah, “*Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, *Enslikopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Ar-Ramli, Syamsudin M, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

- Haqi, Durrotul Isnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan Yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran*”, Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ja’far, A. Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jafri, Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jamilah, Fauziatul, *Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*”, Skripsi Program Sarjana Hukum IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Moeleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskardaya, 2000.
- Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati ma’ani al-fadz al-Manhaj*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad, Imam Syafi’I bin Idris, *Ringkasan Kitab Al umm*, penerjemah: Omron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Pasaribu, C & Suhwardi, K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Latifa Press, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Raminto, Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Shilihi, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Fiqh Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paranogatama Jaya, 2013.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Tika, Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.

Zakaria, Imam A bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr.

## **Jurnal**

Amwaluna, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2 No. 1, Januari 2018.

Nur, Efa Rodiah, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al-adalah*, Vol. 12 No. 3, Juni 2015.

Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Wati Susiati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, November 2017.

### **Wawancara atau Surat**

Alifya, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 25 Februari 2020.

Ani, wawancara dengan penulis, Untung suropati, 05 Maret 2020.

Anton, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 12 Maret 2020.

Bapak Rimin, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 20 Februari 2020.

Devita, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 13 Maret 2020.

Dody, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 07 Maret 2020.

Dokumentasi, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Tahun 2011.

Juwita, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 10 Maret 2020.

Laras, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 08 Maret 2020.

Septi, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 03 Maret 2020.

Toni, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 25 Februari 2020.

Tuty, wawancara dengan penulis, Untung Suropati, 28 Februari 2020.

### **Sumber on-line**

Andreawan. "Sah dan Batalnya Akad" (on-line), tersedia di : <https://text-id.123dok.com/document/eqogv80z1-sah-dan-batalnya-akad.html> (23 November 2019).

Anwarsyar, "Pengertian Makanan" (on-line), tersedia di: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>. (27 september 2019).

Artikelsiana. "Pengertian Jual Beli, Syarat, Dasar Hukum dan Macam-macam Jual Beli" (on-line), tersedia di : <https://www.artikelsiana.com/2019/03/pengertian-jual-beli-syarat-jual-beli-dasar-hukum-macam-jual-beli.html> (22 November 2019).

Muhammad Abduh Tuasikal, "Jual Beli dan Syarat-syaratnya" (on-line), tersedia di: <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html> (13 November 2019).

- Parta Setiawan, “Metode Penelitian Hukum” (on-line), tersedia di: <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> (10 Oktober 2019).
- Ruslan Fariadi, “Jual Beli dalam Islam” (on-line), tersedia di <https://tuntutanislam.id/jual-beli-dalam-islam/> (27 Juni 2020).
- Syaikh Shalih Al Fauzan, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam”, (on-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id/2979-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (20 Februari 2020).
- The Noble Qur'an, “An-Nisa'-29 Surat Wanita Ayat-29” (on-line), tersedia di: <https://id.noblequran.org/quran/surah-an-nisa/29> (12 November 2019).
- Toni Saputra, “Arti Kata Makanan” (on-line), tersedia di: <https://jagoankata.com/arti-kata/makanan.html>. (27 September 2019).
- Tuntunan Islam. “Jual Beli Diperbolehkan” (on-line), tersedia di : <http://tuntunanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> (23 November 2019).
- Yulinda Apriliani, “Usaha Kecil Menengah Kedai Kuliner Layhan”, (on-line), tersedia di: <http://newyulisiregar4.blogspot.com/2017/08/makalah-kewirausahaan-usaha-kecil.html> (28 Juni 2020)
- Zain, “Pengertian Praktik” (on-line), tersedia di: <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>. (27 September 2019).